

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang telah disusun ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Rivieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata ara Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang secara substansi mengamankan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, kami menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak agar lebih baik dimasa yang akan datang, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingg ini diucapkan terima kasih

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (*decision maker*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan

Ditetapkan di : Kejobong
Pada Tanggal : Oktober 2024



EDJO, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680505 198608 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	3
Landasaan Hukum	3
Maksud Dan Tujuan	5
Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEJOBONG TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Kecamatan Kejobong	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejobong	16
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kejobong	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEJOBONG	53
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Kejobong	59
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEJOBONG	61
4. 1 Program Dan Kegiatan serta Pagu Indikatif	61
BAB V PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PRPJPD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara keseluruhan terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Penetapan Ranwal Renja. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil Evaluasi Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan hasil Evaluasi tahun berjalan

Adapun Renja itu sendiri adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan Perangkat Daerah, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk

kerangka regulasi dan kerangka anggaran

Rencana Kerja menterjemahkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program, kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian program Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Kejobong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 dalam penyusunan Renja Kecamatan Kejobong sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyusun Renja Tahun 2025, sesuai ketentuan tersebut.

Rencana Kerja Kecamatan Kejobong Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, periode 2021-2026, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun kedepan adalah arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun ke depan yaitu :

“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berakhlak Mulia”

Disamping Visi Kabupaten Purbalingga juga mempunyai Misi, Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, Efektif, Inovatif, Bersih, Akuntabel dan Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat regius yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT /Tuhan Yang Maha Esa,serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utama pangan dan

papan secara layak

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk mengembangkan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawannya Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
14. Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta dalam pelaksanaan pembangunan juga sebagai panduan bagi pelaksanaan Program / Kegiatan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah tersedianya suatu dokumen untuk mengetahui dalam bentuk perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program dan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dengan Program dan Kegiatan yang dengan harapan dapat mendorong Pembangunan di wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga serta mendorong partisipasi aktif masyarakat Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagai acuan dan tolak ukur bagi Camat selaku pimpinan SKPD Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga serta seluruh perangkat Kecamatan Kejobong dalam melaksanakan tugas pemerintahan

1.3.2 TUJUAN

Adapun Tujuan Rencana Kerja Tahun 2025, mensinkronisasikan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dengan Target dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam Dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum yang kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan 1 (satu) Tahun ke depan;

2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Kejobong;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun Program dan Kegiatan Tahunan Rencana Kerja (RENJA) secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk memahami kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Kecamatan Kejobong Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I .PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEJOBONG TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kejobong
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejobong
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kejobong
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di masa dating

BAB III .TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEJOBONG

- 3.1. Telaahan tentang Kebijakan Nasional
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kejobong

3.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Kejobong

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEJOBONG

4.1 Program dan Kegiatan serta penganggaran

BAB V .PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

KECAMATAN KEJOBONG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kejobong Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kejobong

Rencana Kerja Kecamatan Kejobong merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kejobong, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kecamatan Kejobong tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hingga akhir tahun 2023, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun perbandingan capaian indikator kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kejobong tahun lalu dan capaian renstra tahun 2023, tertuang dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel : 2.1
Perbandingan Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2022 dan 2023

TAHUN 2022					TAHUN 2023						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	83,88	96,41
	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	%	55,76		2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	%	64	61,96	96,81
	3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	83		4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	87	83,88	96,41
Rata – rata Capaian Kinerja											96,5

TABEL : 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELASANAAN RENJA KECAMATAN KEJOBONG DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KEJOBONG S/D TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN REALISASI TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN KEJOBONG TAHUN 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (sub ouput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Derah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
01.2.01.07	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	NA	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	15 Orang / Bulan	15 Orang / Bulan	15 Orang / Bulan	100%	15 Orang / Bulan	15 Orang / Bulan	100%
01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	9 Orang	9 Orang	9 Orang	100%	9 Orang	9 Orang	100%
01.2.02.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NA	12 exemplar	12 exemplar	12 exemplar	100%	12 exemplar	12 exemplar	100%
01.2.06.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	60 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	NA	13 unit	13 unit	13 unit	100%	13 unit	13 unit	100%
01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
01.2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
01.2.09.02	UNSUR KEWILAYAHAN		NA				100%			100%
01.2.09.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA				100%			100%

01.2.09.09	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	26 kegiatan	26 kegiatan	26 kegiatan	100%	26 kegiatan	26 kegiatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	26 kegiatan	26 kegiatan	26 kegiatan	100%	26 kegiatan	26 kegiatan	100%
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan	NA	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	NA	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
02.2.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.04	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	NA	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	14 kegiatan	14 kegiatan	100%
02.2.04.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	100%
03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 desa	100%

03.2.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
03.2.01.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
03.2.01.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%
04.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	NA	12 laporan	12 laporan	5 laporan	42%	12 laporan	5 laporan	42%
04.2.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Potensi Konflik	NA	12 laporan	12 laporan	5 laporan	42%	12 laporan	5 laporan	42%
04.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2023 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Kejobong Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kejobong. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kejobong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kejobong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik

Nilai Evaluasi Pelayanan Publik menjadi indikator untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Berdasarkan penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga, untuk tahun 2023 Kecamatan Kejobong memperoleh nilai evaluasi pelayanan publik sebesar 3,2 Nilai tersebut termasuk kategori “baik”

2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa

Prosentase Keaktifan Lembaga Desa menjadi indikator untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Ada 7 (tujuh) lembaga desa yang dijadikan acuan dalam rangka mendukung indikator tersebut yaitu Karang Taruna, PKK, FGD (Forum Kesehatan), LKMK/LKMD, Posyandu, RT dan RW. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bahwa selama tahun 2023 keaktifan ke 7 lembaga desa dimasing-masing Desa sudah sangat baik sehingga diperoleh Prosentase Keaktifan Lembaga Desa sebesar 100%.

3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman

Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman menjadi indikator untuk Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Secara umum untuk tahun 2023 diwilayah Kecamatan Kejobong termasuk kondusif

karena tidak ada Kejadian Gangguan Ketenteraman yang cukup berarti. Hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait dan dukungan masyarakat secara umum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kejobong. Ada tidaknya Kejadian Gangguan Ketenteraman akan secara rutin dilaporkan per bulan (12 Laporan) ke Satpol PP Kabupaten Purbalingga.

4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan

Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan menjadi indikator untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Sejalan dengan Indikator point 3, Secara umum untuk tahun 2023 di wilayah Kecamatan Kejobong termasuk kondusif karena tidak ada konflik yang cukup berarti. Hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait dan dukungan masyarakat secara umum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kejobong. Ada tidaknya Konflik, akan secara rutin dilaporkan ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga.

5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi menjadi indikator untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun indikator Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi adalah Jumlah Desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2023 tepat waktu. Dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Kejobong, pada tanggal 31 Desember 2023 sejumlah 13 Desa telah menetapkan APBDesa Tahun 2023 sehingga dapat diperoleh data Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi sebesar 100 %.

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kejobong meliputi :

- a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Kecamatan Sesuai SOP
- Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti
- Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan
- Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan	Persen	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	33,33%	48,00%	77,78%	162%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kejobong pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala (setiap bulan);
- Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa;
- Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas;
- Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan.

b. Koodinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Cakupan Desa/Kelurahan yang melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
----	-------------------	--------	------------	------------

			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase keaktifan lembaga desa	Persen	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Desa/ Kelurahan Yang Melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan Sesuai Ketentuan	Persen	100%	100%	100%	100%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kejobong pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi kepada kepala desa / sekretaris desa dan kasi perencanaan secara rutin;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa;
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 9 (sembilan) desa.
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) baik propinsi maupun kabupaten;
- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Review Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejobong 2023
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			86	87	88	89	86	87,905	88	89	Sesuai Target
2	SAKIP			62	64	66	68	62	62,41	66	68	Tidak Sesuai Target
3	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik			3,1	3,2	3,5	3,5	3,1	3,1	3,2	3,5	Sesuai Target
4	Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
5	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
6	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi			100 %	100 %	100 %	100 %	70 %	80%	100 %	100 %	Tidak Sesuai Target
7	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			12	12	12	12	12	12	12	12	Sesuai Target
8	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
9	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
10	Persentase Ketersediaan Laporan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai Target
11	Persentase pengadaan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	Tidak Sesuai Target
12	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	60 %	75 %	80 %	100%	Tidak Sesuai Target

Tabel
Target Indikator Kinerja Pelayanan
Kecamatan Kejobong

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Thn periode RPJMD	Target Capaian tiap Tahun				
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	86	86	87	87	89	90
a	Nilai Evaluasi Pelayanan publik	Angka	3,1	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
b	Cakupan Potensi Konflik	%	100	100	100	100	100	100
c	Prosentase Keaktifan Lembaga desa	%	100	100	100	100	100	100
d	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	%	60	60	65	70	75	80
e	Jumlah Laporan kejadian Gangguan Ketenyraman dan Ketertiban umum yang dilaporkan	Dok	12	12	12	12	12	12
2	Nilai Sakip Kecamatan	Angka	62	62	64	66	68	70
a	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja	%	100	100	100	100	100	100
b	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
c	Persentase Ketersediaan layanan Kepegawaian administrasi Uum dan Jasa Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100

2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KEJOBONG

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kejobong adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Kecamatan Kejobong sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah :

1. NILAI SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kejobong tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

NILAI SAKIP KECAMATAN KEJOBONG

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	20,10
Pengukuran Kinerja	18,60
Pelaporan Kinerja	9,00
Evaluasi Internal	14,25
NILAI TOTAL	61,96

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN

Kecamatan Kejobong sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melayani masyarakat masih harus terus meningkatkan kualitas Pelayanan baik dari sisi sarana dan Prasana maupun Kualitas Sumberdaya Manusianya sehingga tingkat Kepuasan Masyarakat semakin meningkat.

Beberapa permasalahan terkait Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang belum sesuai target antara lain :

- 1) Jumlah SDM / Pegawai (PNS/PPPK) yang kurang, di Kecamatan Kejobong hanya ada 8 PNS
- 2) Prasarana dan sarana yang tersedia kurang memadai
- 3) Sistem Kerja yang belum optimal dan disiplin
- 4) Keterbatasan kemampuan dan ketrampilan petugas
- 5) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan memuaskan
- 6) Dalam Pembinaan Administrasi Desa, Tim Pembina Kecamatan Tidak memiliki kapasitas lebih untuk memberikan Punish dan Reward terhadap Desa dalam melaksanakan tertib administrasi.

Dampak/resiko dari permasalahan tersebut adalah :

- 1) Jumlah SDM kurang, menimbulkan Beban Kerja Overload, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu sehingga secara simultan berdampak pada sasaran kerja yang tidak tercapai dan target Renstra dan Renja yang tidak berhasil sesuai target
- 2) Prasarana dan sarana yang kurang memadai dapat menghambat kecepatan dan ketepatan pelayanan yang memuaskan (IKM).
- 3) Sistem Kerja yang belum optimal dan disiplin, dapat menyebabkan Nilai SAKIP pada target IKU Renstra dan Renja tidak tercapai
- 4) Keterbatasan kemampuan dan ketrampilan petugas, dapat menghambat tuntutan kinerja yang serba kapable dan inovatif, terlebih di era Digital yang serba Aplikatif hal ini dapat menjadi stagnasi dalam pencapaian target Renstra dan Renja.
- 5) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan memuaskan.

3. STUNTING

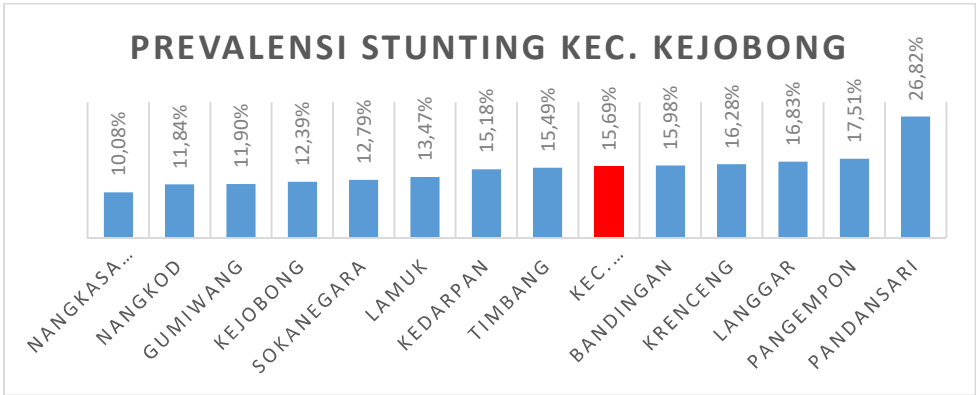
Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak.

Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

TABEL 2.3.2
PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KEJOBONG

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KEJOBONG	3512	122	429	551	15,69%
BANDINGAN	388	18	44	62	15,98%
GUMIWANG	126	3	12	15	11,90%
KEDARPAN	191	6	23	29	15,18%
KEJOBONG	460	13	44	57	12,39%
KRENCENG	258	4	38	42	16,28%
LAMUK	193	4	22	26	13,47%
LANGGAR	505	14	71	85	16,83%
NANGKASAWIT	119	5	7	12	10,08%
NANGKOD	228	11	16	27	11,84%
PANDANSARI	302	24	57	81	26,82%
PANGEMPON	297	12	40	52	17,51%
SOKANEGARA	219	3	25	28	12,79%
TIMBANG	226	5	30	35	15,49%

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KEJOBONG



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata Kecamatan, yaitu Desa Bandingan, Desa Krenceng, Desa Langgar, Desa Pangempon, dan Desa Pandansari. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengkonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
6. Pembentukan / mengaktifkan BKR, Posyandu Remaja.
7. Penyuluhan Tentang Reproduksi Remaja
8. Pembinaan kepada para Calon Pengantin
9. Penyuluhan kepada Ibu Hamil

4. KEKERINGAN / KEKURANGAN AIR BERSIH DI MUSIM KEMARAU

Sebagian wilayah di Kecamatan Kejobong terutama Desa Langgar, sebagian Kejobong, Pangempon, Pandansari, Kedarpan, Nangkod ketika terjadi musim kemarau panjang seperti yang terjadi di Tahun 2023, mengalami kekurangan / krisis air bersih. Mata air sumur gali milik warga sebagian kering dan debit air yang dikelola oleh Desa tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan warga, sehingga banyak warga yang menggantungkan suplai air bersih dari bantuan pemerintah maupun pihak lain. Langkah-langkah yang perlu dilakukan :

- a. Penyuluhan Budaya Hemat air terutama ketika musim kemarau.
- b. Mengusulkan agar Jaringan PDAM bias sampai ke wilayah Kecamatan Kejobong
- c. Koordinasi dengan lintas sektor, upaya pelestarian sumber mata air dengan gerakan penghijauan daerah resapan air sebagai sebuah gerakan.
- d. Memperbanyak Pengelolaan Sarana Air Bersih skala kecil.
- d. Pengalokasian anggaran mitigasi bencana kekeringan.

5. PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEJOBONG

Kasus pernikahan dini pada saat ini cenderung meningkat, hal ini tidak lepas dari akibat pergaulan bebas, beberapa langkah yang sebagai

upaya pencegahan dini, yaitu :

1. Penyuluhan kepada masyarakat dengan kelompok sasaran orang tua yang punya anak remaja.
2. Koordinasi dan optimalisasi forum yang tersedia seperti pengajian, pertemuan RT, Karangtaruna Sosialisasi dampak pernikahan dini.

Dari lima hal permasalahan di atas kami memformulasikan kegiatan yang dapat menjadi prioritas di Tahun 2025 dengan usulan sebagai berikut :

1. pengusulan tambahan ASN (PNS/PPPK) 1 (satu) orang apabila tahun 2025 terdapat rekrutment ASN untuk JFU Verifikator Keuangan
2. Pengadaan Genset 1 (satu) unit
3. Pengadaan Sepeda Motor Jenis Trail 1 (satu) unit
4. Pengusulan peningkatan kapasitas/Kegiatan Pelatihan bagi operator dan perencana dalam menyusun Renstra dan Renja

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA (RANCANGAN AWAL RKPD)

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kejobong merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat,

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah,
2. Program prioritas pembangunan daerah dan,
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kejobong berdasarkan RKPD Kabupaten Purbalingga sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

prioritas pembangunan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RKPD 2025 KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KEJOBONG

RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga			1.802.641.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kejobong , Kab. Purbalingga			1.650.647.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Prosentase ketersediaan lapaotan capaian kinerja		1.304.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kejobong , Kab. Purbalingga	prosentase ketersediaan lapaotan capaian kinerja		19.000.000	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kejobong , Kab. Purbalingga	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,KLJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	4 dokumen	584.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kejobong , Kab. Purbalingga	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,KLJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	4 dokumen	10.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Kejobong , Kab. Purbalingga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	4 dokumen	720.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	4 dokumen	10.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		1.329.219.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		1.480.804.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Kejobong. , Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	15 Orang	1.314.359.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	15 Orang	1.451.047.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	30 Kegiatan	15.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	30 kegiatan	15.000.000	

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	Tersedianya honor pengelola keuangan	9 orang	44.580.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya honor pengelola keuangan	9 orang	44.580.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec Kejobong, Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah	12 bulan	25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah	12 bulan	25.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	25.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		70.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		70.100.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	2.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	2.100.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	29.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	29.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Kejobong., Kab. Purbalingga	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	2.000.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	11.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	11.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kec., Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	12 bulan	24.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	12 bulan	24.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		5.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		5.000.000	
Pengadaan mebeleur	Kec. Kejobong Purbalingga	tersedianya mebel untuk kantor (Lemari Berkas)	50 buah	25.000.000	Pengadaan mebeleur	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	tersedianya mebel untuk rumah dinas camat	50 buah	25.000.000	
						Kec. Kejobong Kab. Purbalingga				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				153.227.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga			153.227.000	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 bulan	2.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	3 bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	3 bulan	6.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan supir	12 bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan supir	12 bulan	36.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga			12.500.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	13 unit	63.188.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	13 unit	63.188.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec., Kab. Pu Kejobong rbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	3 unit	8.220.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	3 unit	8.220.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Kejobong., Kab. Purbalingga	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)	1 unit	14.375.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)	1 unit	14.375.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				66.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga			66.200.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah pelanggaran perda yang ditangani		66.200.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah pelanggaran perda yang ditangani		66.200.000	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kejobong c., Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 kegiatan	36.200.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 kegiatan	36.200.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		16.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan		16.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	6 jenis	14.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	6 jenis	14.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				96.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga			96.000.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		96.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		96.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu	13 desa	70.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu	13 desa	70.000.000	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec., Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	13 desa	26.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	13 desa	26.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				111.079.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga			111.079.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				111.079.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga			111.079.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kejobong , Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	4 kali	42.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	4 kali	42.500.000	
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	10 kali	68.579.000	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	10 kali	68.579.000	

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kejobong , Kab. Purbalingga			29.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga			29.500.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah kasus konflik horisontal		29.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kasus konflik horisontal		29.500.000	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kejobong , Kab. Purbalingga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	1 kegiatan	29.500.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	1 kegiatan	29.500.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		10.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga			10.000.000	
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		10.000.000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		10.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. K Kejobong ab. Purbalingga	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	13 desa	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kejobong Kab. Purbalingga	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	13 desa	10.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kejobong juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kejobong pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Tabael 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Kejobong					
NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA
1	Pelebaran jembatan kabupaten	Jembatan terlalu sempit	RT 03 RW 02 Dusun 2 , Kab. Purbalingga	Kejobong	Sokanegara
2	Pemeliharaan jalan kabupaten	kondisi jalan sudah rusak	jalan raya penghubung desa Lamuk - Sokanegara, , Kab. Purbalingga	Kejobong	Sokanegara
3	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	sepanjang jalan ketika malam gelap tanpa penerangan	Dusun 4, , Kab. Purbalingga	Kejobong	Sokanegara
1	Pemeliharaan jalan kabupaten	jalan sudah rusak dan butuh peningkatan.	RT 12 RW 06 DUSUN 3. PANJANG x LEBAR x TINGGI (350 x 2,7x 0,05)M , Kab. Purbalingga	Kejobong	Gumiwang
2	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	susah mencari bibit unggul yang tahan terhadap lingkungan desa	100 ekor., Kab. Purbalingga	Kejobong	Gumiwang
3	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	belum memiliki fasilitas alat kesenian	Desa Gumiwang. alat rebana 3 set, Kab. Purbalingga	Kejobong	Gumiwang
4	Pembangunan jalan kabupaten	Jalan sudah rusak dan butuh peningkatan.	RT 09-RT 10 RW 05 Dusun 3. PANJANG x LEBAR x TINGGI (750 x 2,7x 0,05)M , Kab. Purbalingga	Kejobong	Gumiwang
1	Pembangunan drainase jalan kabupaten	pada musim penghujan air meluap ke jalan	Ruas Jl. Krenceng - Pandansari RT. 005 RW. 002 +- 300 m, Kab. Purbalingga	Kejobong	Krenceng
2	Pembangunan talud jalan kabupaten	pencegahan terjadinya erosi ke badan ruas jalan	Jl. Krenceng - Pandansari RT. 004 RW. 002, +- 300 m, Kab. Purbalingga	Kejobong	Krenceng

3	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Kondisi jalan gelap,	Desa Kereng RT. 002 RW. 001, 10 Buah Lampu Penerangan Jalan, Kab. Purbalingga	Kejobong	Krenceng
1	Pembangunan jalan kabupaten	Jalan Kabupaten berupa makadam dan rabat yang sudah rusak parah..	Dusun II RT 008 RW 004 Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Volume jalan 350 meter, Kab. Purbalingga	Kejobong	Nangkasawit
2	Pemeliharaan jembatan kabupaten	Jembatan dalam kondisi rusak dan riskan untuk dilalui.	Dusun II RT 005 RW 003 Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Volume 15 meter persegi, Kab. Purbalingga	Kejobong	Nangkasawit
3	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan Usaha Tani membutuhkan drainase untuk memperlancar aliran air sehingga tidak merusak jalan	Dusun II RT 008 RW 004 Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Volume 500 meter x 2 ruas x 0,5 meter, Kab. Purbalingga	Kejobong	Nangkasawit
4	Bantuan peralatan usaha kepada usaha mikro	Pelaku UMKM di Desa Nangkasawit masih banyak yang belum memadai baik dalam permodalan maupun peralatan	Desa Nangkasawit Dusun I dan Dusun II Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Volume : 15 orang/pelaku UMKM, Kab. Purbalingga	Kejobong	Nangkasawit
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Belum adanya PADes	Agro Wisata Bukit Bantarori, Kab. Purbalingga	Kejobong	Pandansari
2	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Rumah Belum Layak	Desa Pandansari (50 Unit), Kab. Purbalingga	Kejobong	Pandansari
3	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Pemulihan Ekonomi Nasional	Desa Pandansari (100 Ekor), Kab. Purbalingga	Kejobong	Pandansari
4	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan Rusak Parah	Desa Pandansari Dusun I RT 005/002 (750 m x 2 m) , Kab. Purbalingga	Kejobong	Pandansari
1	PEMBANGUNAN/REHAB PASAR KECAMATAN	Banyak los dan kios yang rusak atapnya pada bocor	Desa Kejobong RT 002 Rw 001 volume Luas Los 2240 m2 volume pengadaan lahan 1120 m2, Kab. Purbalingga	Kejobong	Kejobong
2	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	belum tersedianya lapangan sepak bola di desa kejobong	Desa Kejobong RT 002 RW 001 Volume 8500 m2, Kab. Purbalingga	Kejobong	Kejobong

1	PEMBANGUNAN/REHAB PASAR KECAMATAN	Banyak los dan kios yang rusak atapnya pada bocor belum tersedianya lahan untuk pasar hewan (masih sewa) seluas 1120 m2	Desa Kejobong RT 002 Rw 001 volume Luas Los 2240 m2 volume pengadaan lahan 1120 m2, Kab. Purbalingga	Kejobong	Kejobong
2	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	belum tersedianya lapangan sepak bola di desa kejobong	Desa Kejobong RT 002 RW 001 Volume 8500 m2, Kab. Purbalingga	Kejobong	Kejobong
3	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	di desa Kejobong disaat musim kemarau sering terjadi kekurangan air bersih	Dersa Kejobong rt. 22 rw 11 dan rt 08 rw 04 volume 2 unit sumur bor, Kab. Purbalingga	Kejobong	Kejobong
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	kurangnya pengetahuan atau potensi masyarakat untuk dapat belajar ilmu digital marketing sampai saat ini belum tersedianya sarpras olahraga seperti lapangan sepak bola	Desa Kejobong 50 orang , Kab. Purbalingga	Kejobong	Kejobong
1	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga		Desa Langgar, 100 x 50 m, Kab. Purbalingga	Kejobong	Langgar
2	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Perlunya akses jalan usaha tani	Langgar RT 01 RW 08 Dusun III, Volume: 3x1000m,	Kejobong	Langgar
3	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung Kantor Desa Sudah Rusak	Desa Langgar RT 02 RW 01, Volume: 1 Unit,	Kejobong	Langgar
1	Penyuluhan dan pelatihan bidang pariwisata	SDM Pengelolaan desa wisata yang belum optimal	Desa Timbang RT 02 Rw 01, Kejobong, Purbalingga. Volume: 20 Orang, Kab. Purbalingga	Kejobong	Timbang
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Belum terselesaikan pembangunan wisata	Timbang RT 06 Rw 03, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga., Kab. Purbalingga	Kejobong	Timbang
3	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Belum memiliki gedung olahraga	Desa Timbang, Kejobong, Purbalingga. Volume: 1 Unit, Kab. Purbalingga	Kejobong	Timbang
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang pemuda	Dukungan Pelaksanaan Pencegahan, Pembrantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelab Narkoba (P4GN)	Desa Timbang, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga Volume: 25 Orang/kegiatan, Kab. Purbalingga	Kejobong	Timbang

1	Pembangunan talud jalan kabupaten	tidak terdapat bahu jalan	Dusun 1 RT 02 RW 01 Volume 250 meter (Komplek Pleci), Kab. Purbalingga	Kejobong	Nangkod
2	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Kurangnya Anggaran untuk Desa Wisata	Dusun 1 RT 02 RW 01 1 Paket (Wisata PLECI EDUPARK) , Kab. Purbalingga	Kejobong	Nangkod
3	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Kesulitan mendapatkan bibit unggul untuk kambing perah	Desa Nangkod RT 02 RW 05 50 Ekor , Kab. Purbalingga	Kejobong	Nangkod
4	Pembangunan/Reh abilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Kurang tersedianya sarpras di obyek wisata Desa	Dusun 1 RT 02 RW 01 PLECI EDUPARK 1 paket, Kab. Purbalingga	Kejobong	Nangkod
1	PEMBANGUNAN/REHAB PASAR KECAMATAN	Kondisi bangunan pasar desa sudah tidak layak dan sudah tidak bisa menampung pedagang	Rt. 003 Rw. 002 Dusun 1 Desa Bandingan Volume 1 paket, Kab. Purbalingga	Kejobong	Bandingan
2	Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Belum ada pagar keliling, halaman masih menggunakan sirtu dan belum ada tempat parkir petugas dan pasien	Rt. 028 Rw. 013 Dusun 5 Desa Bandingan Volume 1 paket, Kab. Purbalingga	Kejobong	Bandingan
3	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Kurangnya perhatian dan pembinaan dari dinas terkait	Desa Bandingan Volume 1 paket, Kab. Purbalingga	Kejobong	Bandingan
4	Pelatihan bidang komunikasi informatika	Kurangnya pengetahuan tentang komunikasi dan informatika	Desa Bandingan Volume 1 paket, Kab. Purbalingga	Kejobong	Bandingan

BAB III

TUJUAN, SASARAN KECAMATAN KEJOBONG

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah ***“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”***.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan

bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban dan Rasa Aman dalam Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
 - 2) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - 3) Menurunnya resiko bencana.

3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah :
 - 1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
 - 2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
 - 4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
 - 5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
 - 6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 7) Meningkatnya budaya gemar membaca.
 - 8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) serta Prestasi Seni.
 - 9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

- 2) Meningkatnya daya saing pariwisata.
- 3) Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
- 5) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
- 6) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
- 7) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
- 8) Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman,merata dan terjangkau.
- 9) Meningkatnya pelayanan transmigrasi.
- 10).Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 11).Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari Visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga maka Kecamatan Kejobong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyesuaikan pada pokok visi yang pertama yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kejobong

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Purbalingga, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dari Misi Kecamatan Kejobong adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan di Kecamatan
- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan.
- Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan.
- Sasaran 1 : Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi.
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kejobong Tahun 2024 sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kejobong sebagai berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN KEJOBONG

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86	87	88	89	90
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan.	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	30	32	34	37	39
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70

3.2.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi, kebijakan dan tugas pokok dan fungsi serta mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Kecamatan Kejobong menetapkan rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

I. Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah.
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, targer capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klafikasi program dan kegiatan Kecamatan Kejobong.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kejobong Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga,
- 2) Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya,
- 3) Pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi Kepala Daerah terpilih,
- 4) Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya,
- 5) Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Rencana Kerja Kecamatan Kejobong Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga. Rincian target capaian kinerja dan pendanaan Kecamatan Kejobong tahun 2025 akan disajikan dalam tabel 4.1

TABEL : 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kejobong Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01			Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA (GENERIK)	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kecamatan Kejobong	100%	1.802.641.000	DAU	100%	1.802.641.000
7	01	01	2.01		Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kejobong	100%	10.000.000		5 Dok	10.000.000
7	01	01	2.01	0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Kecamatan Kejobong	4 Dokumen	6.000.000			6.000.000
7	01	01	2.01	0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4.000.000			4.000.000
7	01	01	2.02		Tersedianya Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Kecamatan Kejobong	100%	1.405.793.000		100%	1.405.793.000

7	01	01	2.02	0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kejobong	10 org/bln	1.390.833.000			1.390.833.000
7	01	01	2.02	0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaaan Tugas ASN	Kecamatan Kejobong	20 dokumen	1.000.000			1.000.000
7	01	01	2.02	04	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Kejobong	12 dokumen	13.960.000			13.960.000
7	01	01	2.03		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Kejobong	100%	1.400.000		100%	1.400.000
7	01	01	2.03	06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kejobong	12 Laporan	1.400.000			1.400.000
7	01	01	2.06		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kejobong	100%	25.400.000		100%	25.400.000
7	01	01	2.06	01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kejobong	12 Paket	2.500.000		12 Paket	2.500.000
7	01	01	2.06	04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kejobong	1 Paket	14.000.000		1 Paket	14.000.000
7	01	01	2.06	09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kejobong	12 Laporan	3.700.000		12 Laporan	3.700.000
7	01	01	2.06	11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Kejobong	12 Dokumen	5.200.000		12 Dokumen	5.200.000
7	01	01	2.07		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Kejobong	100%	60.000.000			
7	01	01	2.07		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Kejobong	4 Unit	60.000.000			100.000.000
7	01	01	2.07	0006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Kecamatan Kejobong	4 Unit	60.000.000			100.000.000

							Disediakan						
7	01	01	2.08		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Kecamatan Kejobong	100%	118.260.000		100%	118.260.000
7	01	01	2.08	02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kejobong	12 Laporan	9.600.000		12 Laporan	10.000.000
7	01	01	2.08	04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Kejobong	12 Laporan	108.660.000		12 Laporan	108.660.000
7	01	01	2.09		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Kejobong	12 bulan	75.410.000		12 bulan	75.410.000
7	01	01	2.09	0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kejobong	15 Unit	70.306.000		15 Unit	70.306.000
7	01	01	2.09	0006	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara	Kecamatan Kejobong	3 Unit	2.000.000			10.000.000
7	01	01	2.09	0009	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dipelihara	Kecamatan Kejobong	3 Unit	3.104.000			50.000.000
7	01	02			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Kecamatan Kejobong	3,9	34.452.000	DAU	3,5	34.452.000
7	01	02	2.01		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Kecamatan Kejobong	3,9	30.767.000		3,5	30.767.000
7	01	02	2.01	0002	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kejobong	12 Dokumen	30.767.000			30.767.000

7	01	02	2.04		Terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Pada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Kejobong	100 %	3.685.000			16.000.000
7	01	02	2.04	0001	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Kejobong	15 Dokumen	3.685.000		15 Dokumen	3.685.000
7	01	03			Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kejobong	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kejobong	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	100%	49.800.000	DAU	100%	49.800.000
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Form Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	100%	49.800.000		100%	96.000.000
7	01	03	2.01	0001	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan	12.800.000		13 Lembaga Kemasyaraka tan	12.800.000
7	01	03	2.01	0003	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	13 Laporan	37.000.000			37.000.000
7	01	04			Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	100 %	24.800.000	DAU	100 %	24.760.000
7	01	04	2.01		Terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	12 kegiatan	24.800.000		12 Dok	24.760.000
7	01	04	2.01	0001	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	12 Laporan	22.000.000		12 Laporan	22.000.000

					Wilayah Kecamatan								
7	01	04	2.01	0002	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	12 Laporan	2.800.000		12 Laporan	2.800.000
7	01	05			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	100%	24.600.000	DAU	100%	24.600.000
7	01	05	2.01		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Purbalingga. Kejobong, Semua Kelurahan	100%	24.600.000		100%	24.600.000
7	01	05	2.01	03	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	24.600.000		100 Orang	24.600.000

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kejobong Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kejobong pada Tahun 2025.

Kecamatan Kejobong sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kejobong Tahun 2025 yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka :

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/ kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kejobong Tahun 2025.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kejobong dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kejobong.

Untuk menjamin keberhasilan Implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini :

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rencana Kerja Kecamatan Kejobong Tahun 2025 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian target.

Semoga rencana kerja 2024 ini dapat bermanfaat. Amin.

Kejobong, Oktober 2024
CAMPAK KEJOBONG,

NUPTREDJO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.19680505 198608 1 001